

PT.PSP.A.3-1.2015

# **PEDOMAN TEKNIS PENGEMBANGAN OPTIMASI LAHAN APBN-P TA. 2015**



**DIREKTORAT PERLUASAN DAN PENGELOLAAN LAHAN  
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
JAKARTA, 2015**

## KATA PENGANTAR

Sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,49% per tahun, maka diperlukan upaya peningkatan produksi pangan khususnya beras untuk dapat mempertahankan swasembada pangan dan memantapkan kondisi ketahanan pangan yang berdaulat. Terkait dengan hal tersebut, kegiatan Optimasi Lahan merupakan pilihan yang dapat dilaksanakan karena hasilnya dapat segera terlihat dengan biaya yang relatif murah.

Kegiatan Optimasi Lahan APBN-P 2015 diarahkan untuk meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dan produktivitas persatuan luas lahan, sehingga dipilih pada daerah irigasi yang kondisi jaringan irigasinya baik, daerah rawa dengan tata air makro dan mikro baik serta daerah kering atau tadah hujan yang terdapat sumber air untuk dapat dimanfaatkan sebagai irigasi.

Pedoman Teknis ini masih bersifat umum, namun sudah memberikan arah dan rambu-rambu teknis pelaksanaan optimasi lahan yang dapat dijadikan sebagai pegangan bagi petugas Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk itu, selanjutnya perlu dijabarkan, dan menjadi tanggung jawab dari Dinas Pertanian Provinsi untuk membuat Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota sesuai kondisi lokal.

Semoga Pedoman Teknis ini bermanfaat dan menjadi pegangan petugas Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan.

Jakarta, Januari 2015

**Direktur Jenderal  
Prasarana dan Sarana Pertanian,**

**Dr.Ir.Sumarjo Gatot Irianto,MS.,DAA**  
**NIP. 196010241987031001**

# DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan .....	1
C. Sasaran .....	2
D. Pengertian dan batasan .....	2
II. STRATEGI DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN ....	3
A. Strategi Dasar .....	3
B. Strategi Operasional .....	3
C. Ruang Lingkup Kegiatan .....	4
III. KETENTUAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS .....	5
A. Norma .....	5
B. Ketentuan dan Kriteria .....	5
IV. PELAKSANAAN KEGIATAN .....	7
A. Cara Pelaksanaan.....	7
B. Tahapan Pelaksanaan .....	7
C. Jadwal Kegiatan .....	9
D. Pendanaan .....	9

	<b>Halaman</b>
<b>V. ORGANISASI PELAKSANAAN .....</b>	<b>10</b>
<b>VI. PENGAWALAN, PENDAMPINGAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN .....</b>	<b>11</b>
<b>A. Pengawasan dan Pendampingan.....</b>	<b>11</b>
<b>B. Pengawasan dan Pengendalian .....</b>	<b>14</b>
<b>VII. EVALUASI DAN PELAPORAN .....</b>	<b>17</b>
<b>A. Evaluasi .....</b>	<b>17</b>
<b>B. Pelaporan .....</b>	<b>17</b>
<b>VIII. INDIKATOR KINERJA OPTIMASI LAHAN .....</b>	<b>19</b>
<b>A. Indikator Keluaran .....</b>	<b>19</b>
<b>B. Indikator Hasil .....</b>	<b>19</b>
<b>C. Indikator Manfaat .....</b>	<b>19</b>
<b>D. Indikator Dampak .....</b>	<b>19</b>
<b>IX. PENUTUP .....</b>	<b>20</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Lahan sawah sebagai salah satu faktor produksi yang penting di Indonesia saat ini sudah semakin berkurang. Berdasarkan hasil audit Lahan Kementan tahun 2012 adalah seluas 8.132.346 Ha, dengan IP rata-rata 140 % dan produktivitas rata-rata nasional adalah 5,16 ton/ha. Lahan seluas ini harus dapat menyediakan pangan khususnya padi untuk sekitar 237,6 Juta orang penduduk Indonesia (*BPS- 2010*).

Di lain pihak terjadi alih fungsi lahan sawah diperkirakan  $\pm 100.000$  Ha/tahun yang mengancam upaya peningkatan produksi pangan. Untuk itu Kementerian Pertanian perlu segera mengambil langkah-langkah strategis untuk dapat meningkatkan produktivitas lahan sawah yang ada saat ini sehingga berproduksi lebih maksimal.

Optimasi lahan merupakan salah satu langkah strategis dalam mengantisipasi kekurangan lahan untuk memproduksi padi. Kegiatan ini difokuskan untuk meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dan produktifitas melalui penyediaan sarana produksi (pupuk dan atau kapur) serta bantuan pengolahan tanah.

## B. Tujuan

Meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dan produktifitas lahan sawah melalui penyediaan sarana produksi (pupuk) dan bantuan pengolahan tanah.

### C. Sasaran

Sasaran kegiatan Optimasi Lahan diarahkan pada:

1. Lahan sawah dilahan basah/kering seluas 530.000 Ha.
2. Lahan sawah yang jaringan irigasi primer,sekunder dan tersier tidak ada masalah.
3. Lahan kering yang terdapat sumber air irigasi
4. Indeks Pertanaman (IP) dan Produktifitas dapat ditingkatkan. IP meningkat minimal 0,5 dan produktifitas meningkat minimal 0,3 ton/ha.

### D. Pengertian dan Batasan

Dalam pelaksanaan Optimasi Lahan terdapat pengertian-pengertian/istilah, sebagai berikut :

1. **Optimasi Lahan** adalah usaha meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dan produktifitas melalui penyediaan sarana produksi pupuk/kapur dan pengolahan tanah.
2. **Sawah** adalah lahan usaha tani yang secara fisik permukaan tanahnya rata, dibatasi oleh pematang, sehingga dapat ditanami padi dengan sistem genangan atau pengairan berselang.
3. **Indeks Pertanaman (IP)** adalah frekuensi penanaman pada sebidang lahan pertanian untuk memproduksi bahan pangan dalam kurun waktu 1 tahun.
4. **Produktifitas Hasil** adalah satuan hasil produksi sebagai output dalam satu hektar sawah yang dioptimasi per-satuan input.

## II. STRATEGI DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN

### A. Strategi Dasar

Strategi Dasar Optimasi Lahan adalah :

1. Pelaksanaan identifikasi calon petani dan calon lokasi kegiatan
2. Fasilitasi bantuan pendanaan meliputi sarana produksi pupuk maupun kapur dan olah tanah, pengawalan, pendampingan
3. Penentuan paket kebutuhan optimasi lahan disesuaikan dengan kondisi lahan

### B. Strategi Operasional

Strategi Operasional Pelaksanaan Optimasi Lahan adalah:

#### **PUSAT**

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian c.q. Direktorat Perluasan dan Pengelolaan lahan, melaksanakan upaya Optimasi Lahan dengan tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan perhitungan dan penyusunan alokasi APBN-P Tahun Anggaran Tahun 2015,
2. Memfasilitasi ketersediaan anggaran.
3. Menyusun pedoman, monitoring, evaluasi kegiatan

#### **PROVINSI**

Dinas Pertanian Propinsi berkoordinasi dengan Bakorluh membentuk tim pembina teknis Optimasi Lahan dengan tugas sebagai berikut :

1. Melakukan verifikasi dan validasi usulan calon petani dan calon lokasi Optimasi Lahan yang diusulkan oleh Kabupaten/Kota;
2. Membantu untuk mempercepat proses transfer dana ke Kelompok Tani



3. Melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan membuat laporan kegiatan Optimasi Lahan bersama dengan Bakorluh dan Kodam / Korem

### **KABUPATEN**

Dinas pertanian Kabupaten membentuk tim pelaksana teknis Optimasi Lahan dan dengan tugas sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan mengusulkan calon petani dan calon lokasi (CPCL) untuk kegiatan Optimasi Lahan;
2. Melakukan verifikasi dan validasi calon petani dan calon lokasi Optimasi Lahan dan mengusulkan ke Provinsi
3. Melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, laporan kegiatan Optimasi Lahan bersama dengan Bapeluh dan TNI

### **C. Ruang Lingkup Kegiatan**

Ruang lingkup kegiatan pengembangan Optimasi Lahan berupa :

1. Identifikasi calon petani dan calon lokasi (CPCL)
2. Pembuatan petunjuk pelaksanaan oleh Provinsi
3. Pembuatan petunjuk teknis oleh Kabupaten/Kota
4. Sosialisasi kegiatan
5. Koordinasi
6. Penyediaan prasarana dan sarana pertanian
7. Penanaman & Pemeliharaan
8. Pembinaan dan pendampingan
9. Pelaporan

### III. KETENTUAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS

Ketentuan dan spesifikasi teknis kegiatan pengembangan optimasi lahan meliputi norma, ketentuan dan kriteria sebagai berikut :

#### A. Norma

Optimasi Lahan merupakan kegiatan perbaikan dan peningkatan kesuburan lahan yang mempunyai potensi untuk dapat meningkatkan produksi/produktifitas hasil, serta Indeks Pertanaman (IP) minimal sebesar 0,5 dan atau produktifitas padi meningkat 0,3 ton/ha GKP dari kondisi sebelumnya.

#### B. Ketentuan dan Kriteria

Pengembangan optimasi lahan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

##### 1. Kriteria lokasi

- Lahan sawah yang masih berpotensi dan memiliki peluang untuk ditingkatkan IP nya minimal 0,5 dan atau produktivitasnya meningkat minimal 0,3 ton/ha GKP.
- Lahan sawah pada daerah kering/rawa/tadah hujan yang memiliki potensi sumber air untuk dapat mengairi lahan sawah, dan atau pada lahan irigasi yang kondisi jaringan irigasinya baik
- Lokasi kegiatan Optimasi Lahan APBN-P 2015 **Tidak Boleh** sama dengan lokasi :
  - a. Pengembangan Jaringan Irigasi (PJI) 2015 dari dana refocusing dan APBNP
  - b. Optimasi (OPLA) 2015 dari dana refocusing
  - c. Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) TA. 2015.
  - d. Rehab Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) TA. 2015
  - e. *System of Rice Intensification* (SRI) TA.2015

## 2. Kriteria Petani

- Petani penerima manfaat tergabung dalam Kelompok Tani / P3A.
- Bersedia dan wajib menggunakan paket bantuan yang diberikan.

## IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

### A. Cara Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Optimasi Lahan dilakukan dengan pola bantuan sosial melalui transfer uang ke rekening Kelompok Tani.

### B. Tahapan Pelaksanaan

#### 1. Persiapan

##### a. Pembuatan Petunjuk Pelaksanaan

Pembuatan petunjuk pelaksanaan dilakukan oleh Dinas Pertanian Propinsi sebagai penjabaran dari pedoman teknis yang dibuat oleh Pusat sesuai dengan kondisi daerah.

##### b. Pembuatan Petunjuk Teknis

Pembuatan petunjuk Teknis dilakukan oleh Dinas Pertanian kabupaten sebagai penjabaran dari petunjuk pelaksanaan.

##### c. Identifikasi dan verifikasi Lahan

Dinas Pertanian Propinsi dan Kabupaten/Kota melakukan identifikasi dan verifikasi usulan CPCL.

##### i. Penetapan CPCL

Dinas Pertanian kabupaten menetapkan CPCL

##### ii. Pembukaan Rekening

Kelompoktani terpilih penerima manfaat harus membuka rekening tabungan pada Bank Pemerintah terdekat. Rekening yang dimaksud untuk menampung anggaran Bansos yang akan disalurkan. Rekening tabungan dapat berupa rekening bersama (**Joint Account**) antara Ketua Kelompok Tani dan Kepala Dinas Pertanian atau Petugas yang ditunjuk Kepala Dinas Pertanian Kabupaten setempat atau rekening atas nama Kelompok Tani.

Apabila rekening atas nama Kelompok Tani, maka begitu dana di transfer ke rekening Kelompok Tani, Kepala Dinas harus memberitahukan kepada Kepala Bank dimana rekening tersebut berada, untuk menyatakan bahwa pencairan dana hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten atau Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten.

d. Penyusunan RUKK

Penyusunan RUKK dilakukan berdasarkan musyawarah kelompok tani dengan bimbingan Tim Teknis Kabupaten/Kota.

## **2. Pelaksanaan Fisik**

Pelaksanaan fisik kegiatan Optimasi Lahan sebagai berikut:

a. Penyiapan Lahan

Pengolahan lahan berupa pekerjaan pencangkulan atau pembajakan, perataan bidang olah, pembuatan petak-petak, pengguludan, dan kegiatan lainnya sesuai usulan dan tergantung kondisi lahan

b. Penyediaan Sarana produksi/ pupuk

Optimasi Lahan dilakukan melalui pemberian pupuk (anorganik / organik / kompos / pupuk hayati) serta bantuan biaya olah tanah. Sarana produksi pupuk yang dibeli oleh Kelompok Tani tidak boleh diperjual belikan.

c. Penanaman

Benih merupakan swadaya petani dan penanaman dilakukan sesuai musim tanam dan jadwal tanam.

d. **Pemeliharaan**

Pemeliharaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab petani dan masyarakat secara swadaya.

**C. Jadwal Kegiatan**

Dinas Pertanian Kabupaten/Kota membuat jadwal pelaksanaan kegiatan dituangkan dalam "*Rencana Tanam*"

**D. Pendanaan**

Biaya dan unit cost pelaksanaan kegiatan Optimasi Lahan dibiayai dari Dana Tugas Pembantuan (TP) tahun 2015 sebesar Rp. 1.200.000,-/Ha

Dalam pelaksanaan transfer bantuan sosial untuk kegiatan optimasi lahan agar mengacu pada Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian.

## **V. ORGANISASI PELAKSANAAN**

Dalam pelaksanaan Optimasi Lahan, diperlukan organisasi pelaksanaan ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan antara lain koordinasi, sosialisasi, pelaksanaan, pembinaan, pendampingan, pengawalan, monitoring dan pelaporan.

Pelaksanaan Optimasi Lahan mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian No 03/Permentan/OT.140/2/2015 tentang pedoman UPSUS peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai melalui program perbaikan jaringan irigasi dan sarana pendukungnya tahun anggaran 2015.

## **VI. PENGAWALAN, PENDAMPINGAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN**

### **A. Pengawasan dan Pendampingan**

Kegiatan Optimasi Lahan dan pendukungnya memerlukan proses pemberdayaan dalam bentuk pengawasan dan pendampingan oleh Perguruan Tinggi, Penyuluh Pertanian dan TNI dengan memperhatikan aspek teknis, sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan.

#### **1. Tingkat Desa**

1. Pengawasan dan pendampingan Optimasi Lahan di tingkat desa menjadi tugas penyuluh pertanian yang bersangkutan;
2. Pendampingan yang bersifat teknis dilakukan berkoordinasi dengan petugas lapangan/perangkat UPT Dinas yang menangani pertanian di kecamatan;
3. Secara khusus tugas pengawasan dan pendampingan yang dilakukan yaitu :
  - a) Mengecek ulang persyaratan kelompok penerima manfaat dan lokasi
  - b) Melakukan pengawasan dan pendampingan pemberkasan administrasi bantuan di tingkat kelompok (RUKK). Penyusunan RUKK dilaksanakan dengan musyawarah Poktan/P3A dengan bimbingan Tim Teknis atau koordinator lapangan. RUKK yang telah disusun harus disetujui oleh Tim teknis/koordinator lapangan dan diketahui oleh KPA/PPK;
  - c) Melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan optimasi lahan dengan melibatkan Babinsa TNI-AD
  - d) Menyusun dan menyampaikan laporan kepada Pimpinan BP3K.



## **2. Tingkat Kecamatan**

1. Balai Penyuluhan, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) dan Koramil melakukan koordinasi pengawalan dan pendampingan kegiatan optimasi lahan yang dilaksanakan oleh penyuluh dan Babinsa di masing-masing desa;
2. Kepala BP3K / koordinator penyuluh dalam merencanakan kegiatan penyuluhan berkoordinasi dengan petugas lapangan / perangkat UPTD di kecamatan, yang menangani pertanian tanaman pangan dan pengairan;
3. Melakukan koordinasi pelaksanaan pengawalan dan pendampingan yang dilakukan oleh para penyuluh melalui metode Latihan dan Kunjungan (LAKU) yang terjadwal
4. Koordinasi pengawalan dan pendampingan di tingkat kecamatan meliputi :
  - a. Melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan Kegiatan optimasi lahan di tingkat Desa;
  - b. Melakukan rekapitulasi laporan masing-masing penyuluh dan Babinsa terhadap kegiatan optimasi lahan di wilayah kerjanya;
  - c. Menyerahkan rekapitulasi laporan kepada KCD dengan tembusan kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan (Bappeluh)/kelembagaan yang menangani penyuluhan di tingkat kabupaten/kota;
  - d. Apabila tidak ada KCD, maka rekapitulasi laporan diserahkan langsung kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dengan tembusan Kepala Bappeluh/kelembagaan yang menangani penyuluhan di tingkat kabupaten/kota.

### **3. Tingkat Kabupaten/kota**

1. Koordinasi pengawalan dan pendampingan kegiatan optimasi lahan dilakukan oleh Kepala Dinas Pertanian, Kepala Bappeluh atau kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian kabupaten/kota dan Komandan Komando Distrik Militer.
2. Sinkronisasi kegiatan pengawalan dan pendampingan dilaksanakan secara terintegrasi, meliputi:
  - a. Melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan kegiatan pengawalan dan pendampingan oleh penyuluh Dinas Pertanian dan Staf Kodim dalam kegiatan optimasi lahan di tingkat Kecamatan;
  - b. Melakukan rekapitulasi laporan masing-masing BP3K terhadap kegiatan optimasi lahan
  - c. Menyerahkan rekapitulasi laporan kepada Dinas Pertanian dan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh).

### **4. Tingkat Provinsi**

1. Koordinasi pengawalan dan pendampingan kegiatan optimasi lahan dilakukan oleh Kadistan Pangan Propinsi Kepala Sekretariat Bakorluh atau kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian provinsi dan Asisten Teritorial Komando Daerah Militer (Aster Kodam)/Kasiter Komando Resort Militer (Korem).
2. Sinkronisasi kegiatan pengawalan dan pendampingan dilaksanakan secara terintegrasi;
3. Melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan kegiatan optimasi lahan di tingkat Kabupaten/Kota;
4. Melakukan rekapitulasi laporan masing-masing Kabupaten/ Kota terhadap kegiatan optimasi lahan

5. Menyerahkan rekapitulasi laporan kepada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

## 5. Tingkat Pusat

Koordinasi kegiatan Optimasi Lahan dilakukan Ditjen PSP selaku Ketua I :

1. Menyelenggarakan rapat koordinasi perencanaan pengawalan dan pendampingan yang dihadiri oleh tim Penanggungjawab Propinsi;
2. Mengendalikan pelaksanaan pengawalan dan pendampingan melalui penanggung jawab Propinsi;
3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pengawalan dan pendampingan penyuluhan pertanian di tingkat nasional;
4. Melakukan evaluasi dan menyusun pelaporan pengawalan dan pedampingan di tingkat nasional.

## B. Pengawasan dan Pengendalian

Dalam sistem pengawasan pada sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja, perlu dilakukan penilaian terhadap capaian kinerja *outputs* dan *outcomes* dari kegiatan optimasi lahan, untuk memberikan keyakinan bahwa sasaran dan tujuan dari kegiatan dapat tercapai sesuai dengan prinsip efisien, ekonomis, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dalam pelaksanaan kegiatan Optimasi Lahan perlu dilakukan Pengawasan Intern oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kementerian Pertanian yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Pengawasan Intern meliputi seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan Optimasi Lahan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan optimasi lahan dilaksanakan mulai dari tahapan persiapan, penyiapan dokumen, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota.

### **1. Tingkat Pusat**

Untuk mengendalikan pelaksanaan Optimasi Lahan tingkat pusat dilakukan melalui pembinaan reguler dan kunjungan ke Propinsi, Kabupaten/Kota dan lapangan untuk menjamin pelaksanaan Optimasi Lahan\sesuai dengan kebijakan umum yang tertuang dalam Pedoman Teknis Optimasi Lahan dari Ditjen PSP. Apabila ditemukan atau terdapat hal yang diluar ketentuan pedoman teknis maka dapat mengirimkan informasi ke alamat dibawah ini :

Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan  
Ditjen. Prasarana dan Sarana Pertanian  
Jl. Taman Margasatwa No. 3 Ragunan  
Jakarta Selatan 12550.  
Telp. : 021-7805552  
Fax. : 021-7805552  
Email : [subditoptimasilahan@gmail.com](mailto:subditoptimasilahan@gmail.com)

## **2. Tingkat Propinsi**

Untuk mengendalikan pelaksanaan Optimasi Lahan di tingkat Propinsi, Kepala Dinas Pertanian Propinsi melakukan pengendalian kegiatan melalui pembinaan reguler dan kunjungan lapangan ke Kabupaten/Kota dan kecamatan untuk menjamin pelaksanaan Optimasi Lahan sesuai dengan kebijakan teknis Optimasi Lahan serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan sesuai dengan Pedoman Teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Perluasan dan Pengelolaan lahan Ditjen PSP.

## **3. Tingkat Kabupaten**

Tim Teknis Kabupaten / Kota melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Optimasi Lahan melalui pembinaan reguler dan kunjungan lapangan ke Kecamatan dan Desa untuk menjamin pelaksanaan kegiatan Optimasi Lahan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan oleh Dinas Pertanian Propinsi dan Juknis yang dikeluarkan Dinas Pertanian Kabupaten. Selanjutnya menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan.

## **4. Periode Pengendalian**

Pengendalian pelaksanaan Optimasi Lahan dari dana APBN-P dilakukan secara berkala setiap Tri Wulan yaitu :

Triwulan I : Akhir bulan Juni 2015

Triwulan II : Akhir bulan September 2015

Triwulan III : Akhir bulan Desember 2015

## **VII. EVALUASI DAN PELAPORAN**

### **A. Evaluasi**

Evaluasi pelaksanaan kegiatan Optimasi Lahan oleh Tim Pusat dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditunjuk oleh Direktur Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Tim Monitoring dan Evaluasi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Optimasi Lahan mencakup evaluasi awal, evaluasi pelaksanaan yang sedang berjalan dan evaluasi akhir.

Evaluasi pelaksanaan Optimasi Lahan di tingkat Propinsi dilakukan oleh Tim Pembina Teknis Propinsi. Apabila diperlukan, Ketua Tim Pembina Teknis Provinsi dapat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi tingkat Propinsi untuk melakukan evaluasi awal, evaluasi pelaksanaan yang sedang berjalan dan evaluasi akhir.

Evaluasi pelaksanaan Optimasi Lahan di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Teknis Kabupaten/Kota. Apabila diperlukan, Ketua Tim Pelaksana Teknis Kabupaten/Kota dapat membentuk POKJA Monitoring dan Evaluasi tingkat Kabupaten/Kota untuk melakukan evaluasi awal, evaluasi pelaksanaan yang sedang berjalan dan evaluasi akhir.

### **B. Pelaporan**

Laporan pengendalian dilakukan secara berjenjang dari Kabupaten sampai ke Pusat. Untuk pelaporan pengendalian dari Propinsi ke Pusat supaya melampirkan juga laporan dari Kabupaten. Laporan perkembangan per bulan pelaksanaan

kegiatan Optimasi Lahan dapat disampaikan melalui ***Aplikasi Model Pelaporan Online (MPO)***.

Dinas lingkup pertanian kabupaten/kota melakukan rekapitulasi laporan dari kelompok dan mengirimkan ke Dinas Pertanian Provinsi dengan tembusan ke Pusat (Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan).

Dinas lingkup pertanian provinsi melakukan rekapitulasi laporan dari dinas lingkup pertanian kabupaten/kota dan mengirimkan ke Pusat (Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan)

Untuk laporan Triwulan pelaksanaan Optimasi Lahan dari dana APBN-P dikirim sesuai jadual sebagai berikut :

- Triwulan I : Disampaikan minggu I bulan Juli 2015
- Triwulan II : Disampaikan minggu I bulan Oktober 2015
- Triwulan III : Disampaikan minggu I bulan Januari 2016

## VIII. INDIKATOR KINERJA OPTIMASI LAHAN

Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kegiatan optimasi lahan yang dibiayai dari dana APBN-Pmaka ditentukan indikator kinerja sebagai berikut :

### A. Indikator Keluaran (Outputs)

Terealisasi kegiatan pengembangan Optimasi Lahan seluas 530.000 Ha.

### B. Indikator Hasil (Outcomes)

1. Meningkatnya indeks pertanaman (IP) minimum sebesar 0,5 (50%) dari kondisi sebelumnya; dan
2. Meningkatnya produksi dan produktifitas hasil padi minimum 0,3 ton/ ha GKP.

### C. Indikator Manfaat (Benefits)

Meningkatnya produksi padi pada lahan sawah lokasi kegiatan Optimasi Lahan

### D. Indikator Dampak (Impacts)

1. Terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat petani.
2. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat petani akibat meningkatnya produksi padi;.
3. Terwujudnya Ketahanan Pangan Daerah dan Nasional



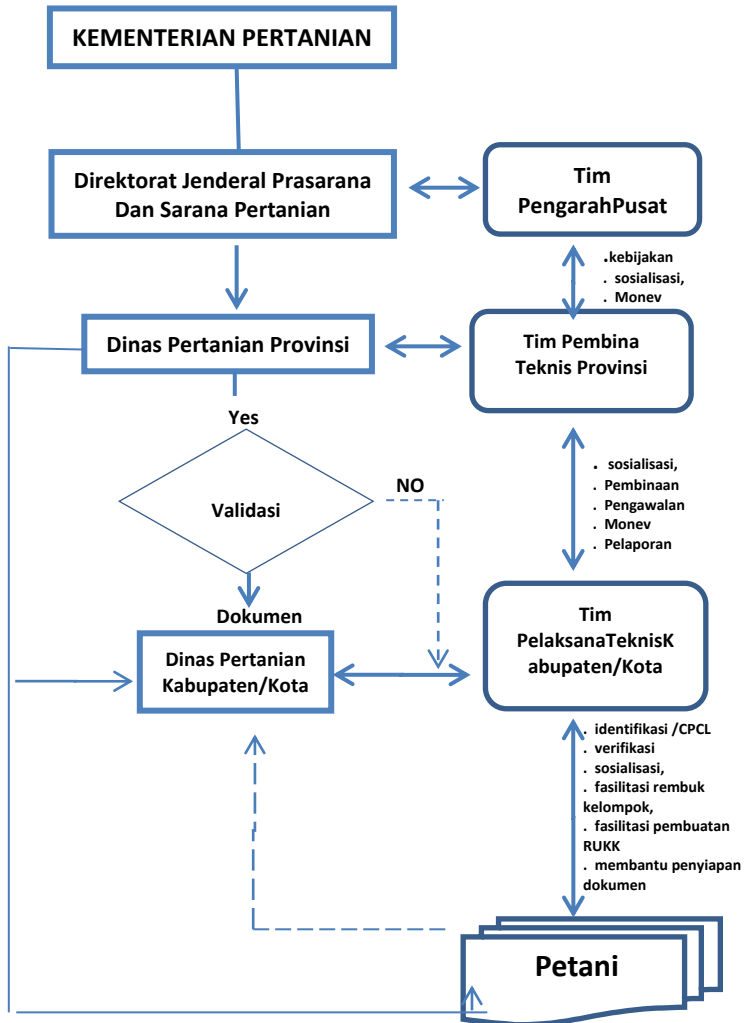
## **IX. PENUTUP**

Kegiatan Optimasi Lahan yang dilaksanakan pada lahan sawah di lahan basah/kering diharapkan dapat meningkatkan Indeks Pertanaman serta meningkatnya produksi dan produktifitas hasil . Optimasi Lahan difokuskan pada pemberian sarana produksi pupuk/kapur serta bantuan olah tanah. Strategi pelaksanaan kegiatan Optimasi Lahan dilakukan secara terpadu dan kerjasama partisipatif dengan petani, sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan produksi padi dan penyerapan tenaga kerja.

Untuk pencapaian tujuan Optimasi Lahan secara optimal, masih diperlukan bimbingan dan pembinaan secara terus menerus oleh Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota dan Propinsi serta petugas penyuluh pertanian dilokasi kegiatan.

Diharapkan hasil yang telah diperoleh dari kegiatan Optimasi Lahan perlu dipelihara agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada petani secara berkelanjutan.

# ALUR PELAKSANAAN OPTIMASI LAHAN SAWAH



## Lampiran 2

Yth.  
Kepala Dinas Pertanian  
Cq. Tim Teknis Kabupaten  
Di  
.....

### **Form Usulan Optimasi Lahan**

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
Nama kelompok :  
Desa :  
Kecamatan :  
Kabupaten/Kota :

Mengusulkan kegiatan Optimasi Lahan pada lahan sawah kami dalam satu kelompok di hamparan seluas ..... hektar yang selama ini belum optimal dalam menghasilkan padi yang diakibatkan :

- Lahan kurang subur
- Tidak adanya biaya oleh tanah
- Lainnya .....

Demikian usulan kami untuk dapat dipertimbangkan.

Ketua Kelompok,

.....

# Lampiran 3

**REKAPITULASI DATA**  
**HASIL VERIFIKASI KEGIATAN OPTIMASI LAHAN TAHUN 2015**

PROPINSI :  
KABUPATEN :  
KECAMATAN :  
DESA :

No.	Nama Kelompok	Ketua	Jumlah Anggota		Titik Koordinat	RUKK					Tanda Tangan
			(nama anggota kelompok)	dioptimasi (Ha)		Komponen					
						Pupuk	Ketersediaan Air	Kompos	Alsintan	Lainnya	

Disahkan :

Kepala Desa

Ketua Tim Teknis Kabupaten

## Lampiran 4

RENCANA USULAN KEGIATAN KELOMPOK (RUKK)							
KEGIATAN PENGEMBANGAN OPTIMASI LAHAN							
TAHUN ANGGARAN 2015							
Kabupaten	:						
Kota	:						
Desa	:						
Nama Kelompok Tani	:						
No	Jenis Kegiatan	Volume Satuan	Harga per Satuan	Jumlah Biaya dan Sumber Dana (Rp)			Metode Pelaksanaan
				Tugas Pembantuan	APBD	Swadaya Petani	
1	Bantuan Saprodi yang diperlukan						
	a. Urea						
	b. NPK						
	c. Pupuk Organik						
2	Bantuan Pengolahan Tanah						
							.....2015
	Mengetahui/Menyetujui						
	Kepala Dinas Pertanian					Ketua Kelompok Tani	
	Kabupaten/Kota						
	.....						.....
	NIP.						

*Contoh ( bisa diubah sesuai dengan kebutuhan kelompok)*

## SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTM)

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
Nama Kelompoktani :  
Desa :  
Kecamatan :  
Kabupaten :  
Propinsi :

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Saya bertanggungjawab penuh atas pemanfaatan dana optimasi lahan sawah sebesar Rp ..... (.....) untuk tujuan meningkatkan produksi dan sekaligus IP sawah, sesuai dengan rencana pemanfaatan RUKK dan RUB yang sudah disusun bersama dan disetujui oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota
2. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan, penyalahgunaan penggunaan Dana Optimasi Lahan, pelaksanaan tidak sesuai ketentuan, saya bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan ke Kas Negara atas kesalahan atau penyalahgunaan tersebut.

Demikian Surat Tanggungjawab Mutlak ini kami buat dengan sebenar benarnya.

Mengetahui/menyetujui,  
Kepala Dinas Pertanian  
Kabupaten .....,

Ketua Kelompoktani,

.....  
**NIP.**

.....

**JADWAL KEGIATAN OPTIMASI LAHAN  
APBN-P TA. 2015**

No.	Nama Kegiatan	April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				Nopember				Desember						
		Minggu ke				Minggu ke				Minggu ke				Minggu ke				Minggu ke				Minggu ke				Minggu ke														
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV			
<b>1</b>	<b>Persiapan</b>																																							
a	Pembuatan Juklak oleh Propinsi	■	■																																					
b	Pembuatan Juknis oleh Kab/Kota		■	■																																				
c	Koordinasi dengan Instansi terkait			■																																				
d	Sosialisasi				■																																			
e	Inventarisasi CPCL					■	■																																	
f	Penetapan Lokasi							■																																
g	Musyawarah Kelompok Tani								■																															
h	Pembuatan rekening kelompok									■																														
i	Pembuatan Rancangan Teknis Sederhana										■	■																												
j	Penyusunan RUKK											■																												
k	Transfer dana											■	■	■																										
<b>2</b>	<b>Pelaksanaan</b>																																							
a	Pengolahan lahan												■	■													■	■												
b	Penyediaan saprodi																																							
c	Penanaman																																							
d	Pemeliharaan																																							
<b>3</b>	<b>Monitoring</b>																																							
<b>4</b>	<b>Evaluasi</b>																																							
a	Kabupaten/Kota										■	■																												
b	Propinsi											■	■																											
c	Pusat												■	■																										
<b>5</b>	<b>Pelaporan</b>																																							
a	Laporan berkala																																							
b	Laporan akhir																																							

## Lampiran 7

### SKOR PEMBOBOTAN FISIK KEGIATAN OPTIMASI LAHAN APBN-P TA. 2015

KEGIATAN		BOBOT (%)
<b>A.</b>	<b>PERSIAPAN</b>	<b>20</b>
1	SK Tim Teknis	2
2	CPCL	3
3	Rancangan Teknis	4
4	RUKK	4
5	Perjanjian kerjasama dan pembukaan rekening	4
6	Transfer Dana	3
<b>B.</b>	<b>PELAKSANAAN / KONSTRUKSI</b>	<b>80</b>
1	Pelaksanaan fisik	40
2	Penyediaan sarana produksi	20
3	Penanaman	20

\* Pembobotan fisik tidak terkait dengan penggunaan dana / anggaran.



**LAPORAN AKHIR KEGIATAN OPTIMASI LAHAN  
APBN-P TA. 2015**

**I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Tujuan
- 1.3. Sasaran Lokasi

**II. RUANG LINGKUP KEGIATAN**

- 2.1. Dukungan Pada Kawasan Komoditi
- 2.2. Komponen Kegiatan

**III. LOKASI KEGIATAN**

**IV. PELAKSANAAN KEGIATAN**

- 4.1. Tahapan Kegiatan
- 4.2. Realisasi Fisik dan Keuangan

**V. PERMASALAHAN DAN PEMECAHAN MASALAH**

- 5.1. Permasalahan Yang Dihadapi
- 5.2. Pemecahan Masalah

**VI. ANALISIS KINERJA**

Input, Output, Outcome, Dampak

**VII. MANFAAT KEGIATAN**

**VIII. PENUTUP**

**LAMPIRAN**